

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

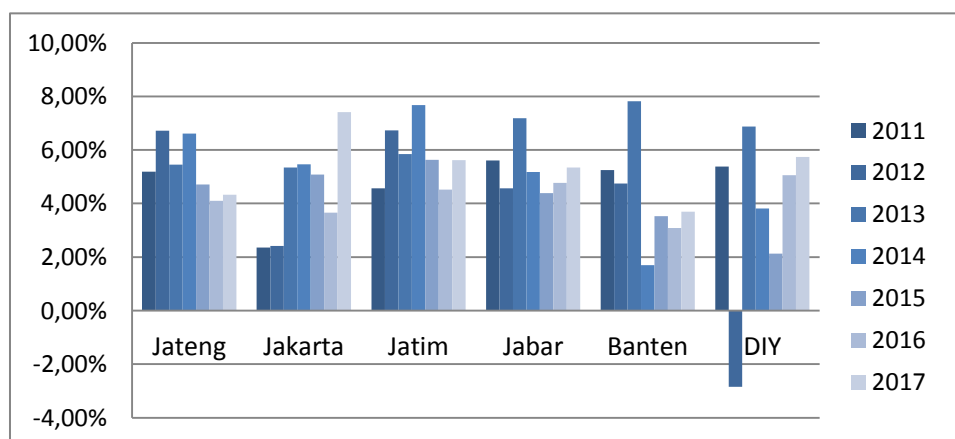
Pembangunan merupakan proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Indonesia merupakan negara yang berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, dan struktur perekonomian yang seimbang (Sukirno, 2007). Salah satu ukuran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri diartikan sebagai total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (BPS, 2019). Apabila PDB-nya menunjukkan adanya peningkatan, maka dikatakan perekonomian negara tersebut menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang PDB terbesar dengan prosentase 21,04 %, lalu diikuti dengan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,23%, lalu

penyumbang terendahnya yaitu dari Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08% (BPS, 2018).

Dari keseluruhan Sektor Industri Pengolahan, 80,15% industri di Indonesia berada di Pulau Jawa sedangkan sisanya berada di luar Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan industri pengolahan terbesar di Pulau Jawa dengan prosentase 34%, lalu diikuti oleh Jawa Barat dengan prosentase 26%, ketiga yaitu Jawa Tengah dengan presentase 18%, keempat yaitu Provinsi Jakarta dengan 12%, kelima Banten dengan 9% dan terakhir yaitu DIY dengan prosentase 1% (BPS, 2017).

Meskipun Pulau Jawa merupakan pulau penyumbang PDB terbesar dalam sektor industri pengolahan, namun laju pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Berikut laju pertumbuhan sektor industri pengolahan selama tahun 2011-2017 di Pulau Jawa :



Gambar I.1
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Periode 2011-2017
 Sumber : Data BPS yang diolah Peneliti tahun 2019

Grafik I.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan industri pengolahan di Pulau Jawa tidak stabil, atau bahkan menurun. Seperti yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun nilai PDRB yang disumbangkan terhadap PDB nasional meningkat setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya menurun, bahkan sampai -2.84 %. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa tahun 2014 terjadi penurunan laju pertumbuhan industri serempak di sebagian besar pulau Jawa.

Dikutip dalam Republika.co.id penurunan laju pertumbuhan Industri Pengolahan terjadi dalam berbagai lapangan usaha. Ada beberapa alasan yang menyebabkan laju pertumbuhan bergerak negatif, diantaranya yaitu penurunan ekspor, penurunan produksi domestik dan juga melambatnya suplai barang impor (Supriyadi, 2017). Selain itu, menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, pertumbuhan industri pengolahan tidak merata diseluruh sektor dan hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk itu, pihaknya pun berkeinginan untuk mendorong perusahaan yang masih tergolong kecil untuk dapat berdaya saing lebih tinggi. Hal ini untuk menumbuhkan kembali pertumbuhan dari industri pengolahan (Muthmainah, 2017).

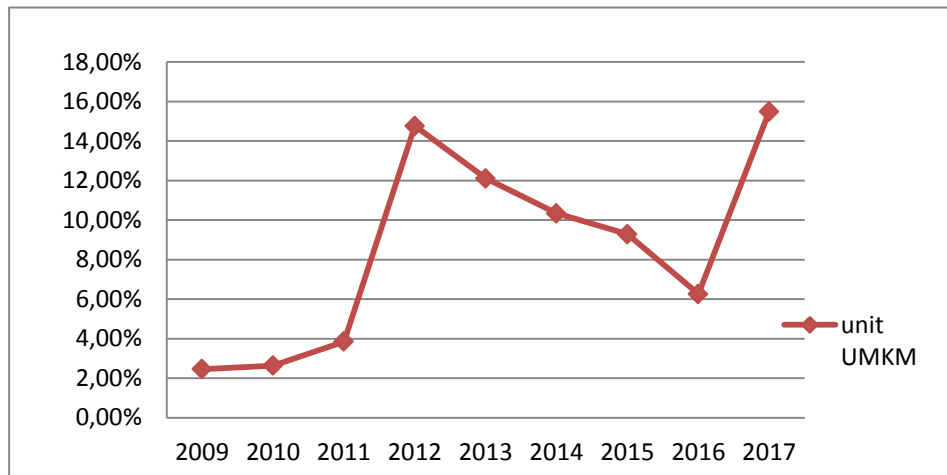
Perusahaan Industri Pengolahan sendiri dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu industri besar, sedang, kecil, dan industri rumah tangga (BPS, 2019). Segmentasi industri atau usaha mikro, kecil dan menengah sering digolongkan secara khusus karena mewakili segmen rakyat kecil dengan sebutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi strategis yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara maju maupun berkembang.

Perhatian pada pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah (Primiana, 2009).

Dewasa ini pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki kendala yang cukup kompleks baik yang berasal dari internal maupun eksternal usaha. Penelitian (Astuti & J, 2003) menjelaskan bahwa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan bahan baku, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, serta informasi dan pemasaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Barbara, Sandy, & Allan, 2000) mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kecil antara lain bidang pemasaran, keuangan, dan manajemen sangat berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan kecil dan menengah. Banyaknya permasalahan mengenai unit UMKM menyebabkan laju pertumbuhan

UMKM melambat. Berikut laju pertumbuhan unit UMKM di Jawa Tengah tahun 2008-2017.



Gambar I.2

Laju Pertumbuhan Unit UMKM di Jawa Tengah Periode 2008-2017
Sumber : Data BPS yang diolah Peneliti tahun 2019

Dari grafik tersebut bisa diketahui bahwa 2009 sampai 2012 unit UMKM mengalami laju pertumbuhan yang positif, bahkan mencapai titik 14,75%. Tetapi pada 2012 sampai 2016 laju pertumbuhan UMKM bergerak negatif. Menurunnya laju pertumbuhannya berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan unit UMKM turun dari 14,74% menjadi 12,11%, tahun 2014 turun menjadi 10,34%, sampai dengan 2016 terus menurun sampai menjadi 6,25%. Meskipun tahun 2017 laju pertumbuhan unit UMKM naik menjadi 15,49%, tetapi hal ini tetap mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pengembangan UMKM masih belum bisa dicapai karena banyaknya permasalahan internal maupun eksternal.

Selain permasalahan diatas, pengembangan UMKM juga sejalan dengan munculnya isu-isu lingkungan sebagai dampak dari kegiatannya

sehari-hari. (Joko, 2008) menyatakan banyak anggapan bahwa UMKM merupakan bisnis dengan aliran *profit-only* atau bisnis ada hanya untuk menghasilkan profit dan bertanggung jawab kepada pemilik modal (*shareholder*). Seharusnya sebuah bisnis juga beraliran *mandate for business*, yang menyatakan bahwa bisnis dan masyarakat ada suatu saling ketergantungan dalam mencapai tujuannya. Jadi bisnis seharusnya bukan fokus pada *shareholder* saja, tetapi juga berfokus pada masyarakat sebagai *stakeholder*.

Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental cost*. Sistem akuntansi yang didalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan disebut dengan *environmental accounting* atau *green accounting*. Ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya dikarenakan tidak peduli terhadap lingkungan atau tidak menerapkan *green accounting*, misalnya PT Indorayan dan PT Lapindo (Ikhsan A. , 2008, p. 2)

Di lingkup UMKM sendiri penerapan *green accounting* masih sangat rendah. *Green accounting* dalam lingkup UMKM masih sekedar kepedulian dan pemahaman untuk mengelola lingkungan agar tidak menimbulkan biaya baru yang dapat mengurangi pendapatan bersih pelaku UMKM (Astuti & Nugroho, 2016). Kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam pemeliharaan lingkungan terjadi diberbagai daerah, salah satunya dikutip oleh Inikebumen.net yang menyatakan bahwa industri lanting di

Kec. Kuwarsan Kab. Kebumen membuang limbah di lingkungan masyarakat. Hal ini dikeluhkan oleh warga sekitar. Salah satu pengusaha lanting mengatakan bahwa limbah tidak diolah terlebih dahulu karena belum adanya modal untuk membuat pengelolaan limbah (Utama, 2018).

Artinya, kesadaran akan lingkungan para pelaku UMKM di Kab. Kebumen khususnya industri lanting masih kurang. Tidak adanya pengolahan limbah cair akan merugikan masyarakat maupun pelaku industri lanting itu sendiri. Jika tidak ada lagi penanganan maka hal ini bisa menjadi suatu kerugian bagi industri tersebut karena pembiayaan untuk pengolahan pencemaran lingkungan akan lebih besar dibandingkan dengan pengolahan limbah. Tidak adanya aliran air bersih dapat menghambat penggunaan air dalam pengelolaan usaha yang akhirnya akan mengurangi produktivitas UMKM tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam proses produksi lanting, pelaku usaha kurang memperhatikan bagaimana proses produksi tersebut agar tidak mencemari lingkungan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Selain masalah biaya lingkungan, keberhasilan UMKM juga dihadapkan dengan masalah pembukuan ataupun penggunaan informasi akuntansi yang dihasilkan dari pembukuan. Setiap kegiatan bisnis tentunya memerlukan pencatatan akuntansi agar setiap transaksi bisa diketahui secara jelas. Pelaku UMKM perlu memiliki pembukuan yang baik untuk menunjang keberlangsungan dan pengembangan usahanya. Pembukuan

yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan (Wibowo & Kurniawati, 2015).

Permasalahan penggunaan informasi akuntansi dalam keberhasilan usaha di UMKM dikutip dalam Sindonews.com, 78% pengusaha pemula gagal menjalankan usahanya pada tahun pertama. Sebagian besar bukan karena produknya tidak memiliki pasar, melainkan karena masalah pembukuan yang tidak terkelola baik (Budianto, 2018). Dari artikel tersebut, dapat terlihat bahwa faktor kegagalan terbesar dalam UMKM saat ini adalah tidak adanya pembukuan akuntansi UMKM. Padahal dengan pembukuan yang rapi, para pelaku usaha bisa mendapatkan informasi akuntansi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Unsur itu menjadi penting untuk memetakan kelangsungan usaha selanjutnya.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai penerapan *green accounting* dilakukan oleh penelitian (Yacob & Moorthy, 2013), penelitian tersebut dilakukan di beberapa perusahaan dan menunjukkan bahwa dengan perencanaan lingkungan yang lebih proaktif melalui pengakuan dan pengurangan biaya lingkungan akan mengakibatkan peningkatan alokasi dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Sedangkan penelitian (Homan, 2016) menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* mempengaruhi secara positif kinerja lingkungan dan keuangan suatu perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan ditandai dengan peningkatan penjualan dan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jika UMKM di

Indonesia menerapkan *green accounting* dalam kegiatan operasional kegiatannya, hal ini akan membantu pengembangan UMKM sebagai pondasi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan penelitian (Yulianthi & Susyarini, 2017) yang dilakukan di usaha penginapan di Pulau Bali menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan informasi dengan keberhasilan usaha jasa penginapan bertarif kecil. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh usaha kecil tersebut masih sangat sederhana seperti neraca, laba rugi dan arus kas. Penggunaan informasi akuntansi di usaha tersebut digunakan untuk untuk melakukan proyeksi kebutuhan uang dimasa yang akan datang, mengontrol biaya, menjalankan tugas, dan lain-lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Bila pada penelitian sebelumnya meneliti penerapan *green accounting* di sebuah perusahaan yang telah melakukan pencatatan secara langsung mengenai pengeluaran biaya lingkungan, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian penerapan *green accounting* dalam UMKM. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesadaran pelaku UMKM mengenai *green accounting* masing rendah. Selain itu penelitian sebelumnya juga hanya menggunakan satu variabel dalam meneliti keberhasilan usaha, antara variabel penerapan *green accounting* atau variabel penggunaan informasi akuntansi. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan *green accounting* dalam operasional UMKM dan juga penggunaan informasi akuntansi dalam menunjang keberhasilan UMKM, dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah berikut :

1. Adakah pengaruh penerapan *green accounting* terhadap keberhasilan usaha?
2. Adakah pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha?
3. Adakah pengaruh *green accounting* dan penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *green accounting* dan penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha khususnya UMKM. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan

perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan keberhasilan usaha.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai konsep akuntansi lingkungan (*green accounting*) yang merupakan konsep baru dari bidang akuntansi. Selain itu, peneliti juga menjadi lebih tahu penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan oleh usaha lingkup UMKM.

b. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan operasi usahanya terkait masalah *green accounting* dan penggunaan informasi akuntansi dalam menunjang keberhasilan usaha. Masalah *green accounting* kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah. Selain itu, pelaku UMKM dapat memaksimalkan penggunaan informasi akuntansi dari pembukuan atau pencatatan yang telah dibuat oleh pelaku usaha.